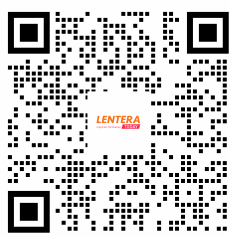




KPK UNGKAP MAHKAMAH AGUNG DISKON HUKUMAN KORUPTOR



Peninjauan kembali (PK) menjadi jalan keluar bagi koruptor untuk mendapat diskon hukuman. Modusnya adalah dengan menyatakan menerima putusan, majelis hakim di tingkat pengadilan pertama. Beberapa waktu setelah putusan dinyatakan inkrah, mereka langsung mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA). Ironisnya, MA sebagai pemegang 'bola panas' seringkali 'mengobrol' pemotongan hukuman bagi pelaku rasuah ini. KPK mengungkapkan adanya 20 terpidana kasus tindak pidana korupsi yang hukumannya dipotong MA. Seluruh perkara itu disebut KPK ditangani sepanjang 2019-2020.



Baca Hal 11

20 PERKARA KORUPSI DITANGANI KPK YANG HUKUMANNYA DIPOTONG MA



1. **Mantan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud**, di kasus suap pekerjaan proyek infrastruktur. Diwan diputus 6 tahun penjara. Usai mengajukan PK, hukuman menjadi 4 tahun dan 6 bulan.
2. **Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng**, adik kandung Andi Mallarangeng di kasus suap proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang. Choel diputus 3 tahun 6 bulan penjara. Di tingkat PK, hukuman Choel menjadi 3 tahun.
3. **Mantan Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun**, di kasus suap mantan Ketua MK Akil Mochtar dalam sengketa pilkada Kabupaten Buton. Samsu Umar menjalani hukuman 3 tahun penjara dari yang semula hukumannya 3 tahun 9 bulan.
4. **Billy Sindoro** dinyatakan majelis hakim terbukti bersalah melakukan suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta. Dia divonis penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara. Kemudian, Billy mengajukan permohonan PK atas hukumannya itu. PK dikabulkan, akhirnya vonis penjara terhadap Billy menjadi 2 tahun.
5. **Pengusaha Hadi Setiawan**, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan terkait kasus suap hakim ad hoc PN Tipikor Medan Merry Purba. Vonis dikurangi menjadi 3 tahun penjara.
6. **Mantan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi** terbukti menerima duit senilai Rp 1,5 miliar terkait izin Amdal di kawasan industri Cilegon yang menjerat dirinya. Iman Ariyadi telah dijatuhi vonis 6 tahun penjara. Lalu, Iman Ariyadi mengajukan peninjauan kembali (PK) hukuman pun dipotong menjadi 4 tahun penjara.

UPDATE PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

	KASUS POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
INDONESIA	248,852	180,797	9,677
Seluruh Dunia	31,033,397	21,256,938	960,736

Update : 21 September 2020 Pukul 15.30 PM
 Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins

Baca hal 11

KOMITMEN GO DIGITAL, GM PERTAMINA CEK LAYANAN MyPERTAMINA DI SPBU

Surabaya- Sebagai bentuk pelayanan yang optimal kepada pelanggan, General Manager PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) V wilayah Jatimbalinus, CD. Sasongko memeriksa langsung sarana dan prasarana pendukung penerapan contactless payment di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan mengandalkan aplikasi MyPertamina.

"Tinjauan lokasi ini guna memastikan seluruh sarana prasarana yang digunakan dalam melayani pelanggan setia Pertamina berfungsi dengan baik, mulai dari papan informasi petunjuk tata cara transaksi, mesin Electronic Data Capture (EDC), koneksi dalam jaringan provider komunikasi, hingga kesiapan operator SPBU di lapangan untuk melayani masyarakat dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan," ujar Sasongko.

Menurut Sasongko, di era digital seperti saat ini, dimana kebutuhan dari masyarakat untuk bertransaksi secara praktis menggunakan fintech (financial technology) dalam genggaman juga semakin meningkat, Pertamina berupaya menjawab tantangan tersebut dengan terus meningkatkan layanan MyPertamina yang sudah berjalan selama ini.

"Pertamina memiliki aplikasi MyPertamina sebagai komitmen kami dalam customer focus. Seiring berjalannya waktu peningkatan jumlah transaksi via



GM PT Pertamina (Persero) MOR V wilayah Jatimbalinus, CD. Sasongko memeriksa langsung sarana dan prasarana pendukung penerapan MyPertamina

MyPertamina juga terus bertambah, di pekan kedua Bulan September (13/9), tercatat sebanyak lebih dari 260 ribu transaksi di SPBU yang dilakukan oleh pelanggan yang sudah merasakan berbagai kenyamanan melalui aplikasi MyPertamina," ujar Sasongko.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Pertamina, terlihat bahwa terdapat kenaikan transaksi melalui aplikasi MyPertamina di seluruh wilayah MOR V Jatimbalinus. Pada dua minggu terakhir di bulan Agustus, Pertamina mencatat 27.900 transaksi harian, sedangkan pada dua minggu pertama di bulan September ini, Pertamina mencatat 30.780 transaksi harian atau naik 11%.

Seperti di Surabaya misalnya, Tercatat rata-rata transaksi harian BBM melalui

aplikasi MyPertamina sampai dengan minggu ke-2 September di kota Surabaya sebesar 8.796 transaksi per hari, naik 2.5 kali lipat dibandingkan dengan transaksi rata-rata harian pada bulan Juni sebesar 3.500 transaksi per hari.

Di Malang Raya, transaksi non-tunai di Malang Raya rata-rata di bulan Juni 2020 hanya sekitar 940 transaksi per hari. Pada minggu ke-2 September ini, Pertamina mencatat rata-rata transaksi harian BBM melalui aplikasi MyPertamina sebesar 7.780 transaksi per hari.

Pengecekan sarana prasarana pendukung MyPertamina pada hari ini (Minggu, 20/9) di SPBU 54.602.53, Gunungsari dan SPBU 54.602.13 Mayjend Sungkono akan dilakukan secara rutin diseluruh lokasi SPBU yang sudah aktif pelayanan MyPertamina. "1.165 lokasi SPBU layanan MyPertamina di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat tetap meningkatkan layanannya dan memberikan pengalaman bertransaksi secara contactless untuk kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan," pungkas Sasongko.

Masyarakat bisa ikut aktif dalam memberikan inspirasi dan dukungan untuk meningkatkan pelayanan Pertamina terutama dalam pendistribusian energi minyak dan gas dengan cara menyampaikan saran dan kritik melalui Pertamina Call Center di nomor 135.(adv)

MASIH DIKAJI MENKEU, JIKA PAJAK 0% HARGA MOBIL TINGGAL SEPARUH

Menteri Keuangan Sri Mulyani masih mengkaji lebih dalam usulan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengenai rencana pembebasan pajak mobil baru atau Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) nol persen.

Usulan Menperin tersebut telah diterima secara resmi pada bulan ini. Isi usulan itu secara garis besar adalah pembebasan pajak-pajak

sementara terkait kendaraan bermotor untuk melindungi industri dari potensi kerugian yang dalam. Secara umum, otoritas fiskal mendukung segala upaya penanggulangan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Untuk sektor usaha, program pemulihan ekonomi nasional juga telah digulirkan dari sisi suplai maupun demand.

Kata Mereka



STAF KHUSUS
MENTERI
KEUANGAN,
YUSTINUS
PRASTOWO

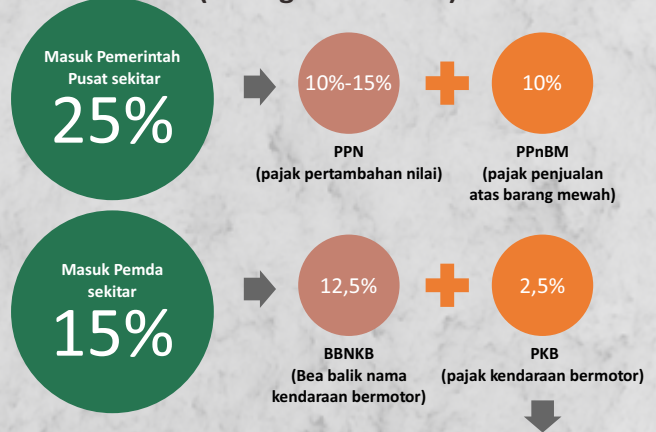
"Mengenai usulan tersebut, tentu kami perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan rekan-rekan di kementerian / lembaga terkait serta stakeholder terkait lainnya, dan juga mengkaji lebih dalam usulan dimaksud secara komprehensif dengan berbagai pertimbangan. Program PEN untuk sisi supply dan telah digulirkan untuk menopang daya beli masyarakat, serta membantu keberlangsungan usaha di berbagai sektor utamanya dari sisi keringanan arus kas."



KETUA I
GAIKINDO,
JONGKIE D
SUGIARTO

"Maka dengan dipotongnya beberapa macam pajak kendaraan bermotor, harga jual mobil baru akan bisa turun. Sehingga masyarakat bisa membeli mobil baru. Dengan demikian maka produksi mobil dan pabrik-pabrik komponennya dapat bekerja kembali. Dengan demikian maka dapat dihindari PHK di pabrik-pabrik tersebut," ya dari sisi keringanan arus kas."

PERKIRAAN HARGA MOBIL BILA PAJAK 0% (Hitungan GaiKINDO)



Total Pajak 40% dari harga mobil, sehingga harga mobil bisa separuh harga dari posisi saat ini

ANGGARAN JANGGAL PERTANIAN BIKIN DPR EMOSI

Komisi IV DPR RI dibikin geregetan saat melakukan rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo membahas alokasi anggaran tahun 2021, Senin (21/9). Besaran anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rencana kerja anggaran (RKA) tahun 2021 sebesar Rp 21.838.977.027.000 dinilai tak memiliki sense of crisis. Belum lagi beberapa pos anggaran yang dinilai janggal. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi IV DPR RI dari fraksi PDIP Sudin.

ANGGARAN YANG DISOROT DPR RI

RKA Kementan Tahun 2021 Rp 21,8 Triliun

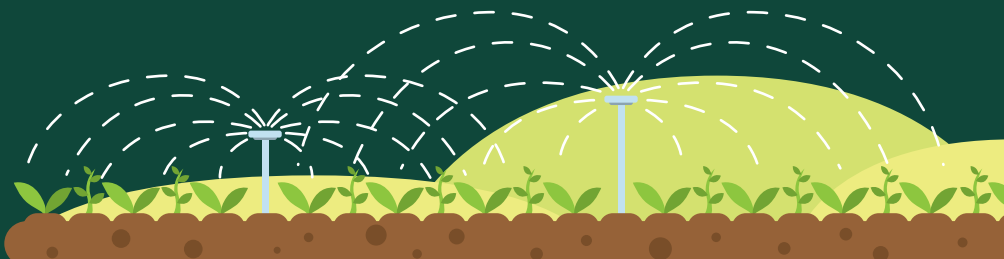
"Komisi IV menilai masih banyak kegiatan berorientasi direktorat sentris, setiap eselon harus punya kegiatan, artinya kegiatan masih belum fokus pada kebutuhan mendesak petani saat ini. Selain itu masih ada kegiatan yang skalanya kecil dan tersebar, sehingga bisa diperkirakan tidak berdampak pada nasional. Dan anggaran rasional perjalanan dinas dan juga pengadaan kendaraan dinas masih dirancang sangat besar, belum ada sense of crisis."

Pengadaan 500.000 Ayam Senilai Rp 33,7 M

"Masalah pengadaan 500.000 ekor ayam lokal ini kalau kita hitung-hitung menjadi Rp 67.400/ekor. Sekarang kalau kita mau kasih bantuan kepada masyarakat misalnya ayam, paling tidak ya tidak semua beban dibebankan ke kita. Masa kasih kandang juga, ini, nggak perlulah. Cobalah saya minta itung lagi yang 500 ribu ekor ayam lokal. Ini kita bukannya tidak mau membantu rakyat, tapi kita mendidik agar mandiri."

Rp 738 Juta/Desa buat Bengkel Alsintan

"Gila satu desa dikasih Rp 738 juta. Ini uang negara, Bapak! Saudara Dirjen, saya minta itu dibatalin! Nggak ada itu! Masa 1 desa dikasih Rp 738 juta untuk bengkel? Saya bilang dari kemarin, Anda saja kalau beli motor, beli mobil, pasti ada akta service-nya, masa ini satu desa dikasih Rp 738 juta untuk bangun gedung, beli alat? Tolong Pak, tolong Pak! Kenapa Anda nggak sekalian panggil teknisi dari Jepang untuk tinggal di desa itu sekalian? Mohon maaf Pak Menteri, saya emosi kalau melihat begini."



Ketua Komisi IV DPR RI dari fraksi PDIP, Sudin

**TOTAL PAGU
ANGGARAN
KEMANTAN 2021
Rp 21,84 T**

- Sekretariat Jenderal mendapatkan anggaran **Rp 1,81 triliun**
- Inspektorat Jenderal sebesar **Rp 124,58 triliun.**
- Ditjen Tanaman Pangan sebesar **Rp 4,82 triliun**
- Ditjen Hortikultura sebesar **Rp 1,08 triliun**
- Ditjen Perkebunan sebesar **Rp 1,61 triliun**
- Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar **Rp 2,08 triliun**

- Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian sebesar **Rp 5,26 triliun.**
- Badan Litbang Pertanian Sebesar **Rp 1,72 triliun**
- Badan PPSDM sebesar **Rp 1,39 triliun**
- Badan Ketahanan Pangan **Rp 900,9 miliar**
- Badan Karantina Pertanian **Rp 1,01 miliar.**



Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

PERSIAPAN JELANG PIALA DUNIA U-20

GBT DITARGETKAN SELESAI DESEMBER,
KINI 3 LAPANGAN LATIHAN MULAI DIKERJAKAN

Surabaya- Persiapan Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya sebagai salah satu venue Piala Dunia U-20 Indonesia, sudah memasuki beberapa tahapan akhir. Ditargetkan bulan Desember 2020 nanti semua pengerjaan telah terselesaikan. Kini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga telah memulai tiga lapangan latihan yang ada di sisi utara stadion utama.

"Jadi, selain Stadion GBT, kita diminta untuk menyiapkan empat lapangan latihan, sehingga nanti yang akan digunakan adalah dua lapangan latihan yang mulai kita bangun, ditambah Stadion 10 November dan juga Lapangan Thor. Nah, meskipun yang paling dibutuhkan hanya dua lapangan di samping GBT, tapi kita akan tetap bangun 3 lapangan latihan di situ, siapa tahu nanti bisa disewakan," kata Wali Kota Tri Rismaharini, Senin (21/9).

Sebenarnya, lanjut dia, sejak awal atau sejak biding, Pemkot Surabaya sudah mengusulkan dan sudah menyiapkan lima lapangan latihan ditambah satu lapangan utama, yaitu Stadion GBT. Namun di tengah perjalanan, diputuskan satu lapangan latihan di Stadion Bangkalan, sehingga besar kemungkinan satu lapangan latihan yang akan dibangun pemkot di

samping GBT itu tidak akan dipakai dalam ajang tersebut. "Tidak apa-apa kita akan tetap bangun tiga lapangan latihan di samping GBT itu, karena siapa tahu nanti bisa disewakan," ucapnya lagi.

Sementara itu, Kepala Bidang Bangunan dan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR) Surabaya Iman Kristian memastikan pembangunan tiga lapangan latihan itu sudah mulai dikerjakan oleh pihak ketiga selaku pemenang lelang. Sebab, sudah ada pemenang lelangnya dan mereka langsung bergerak mengerjakan lapangan tersebut.

Menurut Iman, anggaran pembangunan tiga lapangan itu dilakukan oleh dua dinas sekaligus, yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) dan DPRKP-CKTR. Anggaran yang dikeluarkan oleh Dispora akan meng-cover pembangunan lapangan, pembangunan drainase, penyiraman dan penanaman rumput.

Sedangkan anggaran yang dikeluarkan oleh DPRKP-CKTR akan mengcover pembangunan tribun penonton, ruang ganti, kamar mandi, pemasangan tiang lampu dan lampu lapangan yang nantinya 1.500 lux. "Nah, anggaran yang dikeluarkan oleh Dispora sekitar Rp 25 miliar dan DPRKP-



Penanaman rumput di GBT Surabaya sebagai salah satu venue Piala Dunia U-20 Indonesia

CKTR juga sekitar Rp 25 miliar," tegasnya.

Selain itu, Iman juga menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya juga menyiapkan dua lapangan latihan lainnya, yaitu di Stadion 10 November dan lapangan Thor. Khusus untuk Stadion 10 November, posisinya saat ini sudah selesai semua renovasinya, tinggal menunggu pertumbuhan rumput lapangan.

Pemkot juga berencana bakal segera menambah ketersediaan digital LCD scoring board di GBT. Seperti yang diketahui, GBT telah memiliki satu unit LCD scoring board yang difungsikan untuk penunjuk waktu, skor dan bakal menayangkan jalannya pertandingan juga. "Jadi ada arahan dari ibu wali kota saat ini scoring board sudah ada satu unit, lalu penambahan saat ini sedang kita lakukan persiapan," katanya. (Ard)

DINDIK KAB. BLITAR USULKAN SISWA SD-SMP
DAPAT KUOTA INTERNET GRATIS

Blitar - Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Blitar mengusulkan ratusan ribu siswa tingkat SD hingga SMP, untuk mendapatkan bantuan kuota internet gratis dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Saat ini sendiri proses sudah sampai tahap pendataan.

"Untuk Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ melalui daring yang dibutuhkan memang kuota internet bagi siswa SD - SMP. Saat ini sudah dalam tahap pendataan, seluruhnya siswa SD - SMP kita usulkan," ujar Kepala Dindik Kabupaten Blitar, Budi Kusumarjaka, Senin (21/9).

Dijelaskan Budi bantuan kuota internet gratis ini, diusulkan untuk 3 bulan yaitu mulai Oktober hingga Desember 2020. "Sesuai data jumlah siswa SD yang diusulkan sebanyak 70.737, sedangkan siswa SMP sebanyak 32.956, sehingga total 103.693 siswa se-Kabupaten Blitar," jelasnya.

Adapun bantuan kuota internet gratis untuk membantu PJJ di saat pandemi Covid-19 ini, untuk siswa SD-SMP se-

besar 32 GigaByte (Gb) tiap bulan selama 3 bulan. "Jumlah ini sudah cukup untuk belajar dan mengerjakan tugas selama sebulan, bahkan lebih dari cukup," ungkap Budi.

Sedangkan untuk siswa yang rumahnya tidak ada jaringan internet, ada Program Guru Kunjung yakni mendatangi murid di rumah salah satu siswa untuk belajar kelompok misal 5 orang. Selain PJJ secara daring, juga ada pembelajaran dengan metode Luring (Luar Daring). "Ini yang dilakukan teman-teman guru, untuk membantu belajar dan memberikan tugas para siswa. Dijadwalkan waktu dan tempatnya, maka guru akan berkeliling datang ke rumah siswa," ungkapnya.

Selain murid SD-SMP, guru dan dosen juga diusulkan mendapat bantuan kuota internet gratis ini. Untuk guru sebesar 45 Gb dan dosen 50 Gb, untuk membantu kelancaran PJJ.

Sementara teknis pemberian bantuan kuota internet gratis ini, sekolah mengirimkan data nomor Handphone (HP) siswa maupun guru dan dosen yang di



Kepala Dindik Kabupaten Blitar, Budi Kusumarjaka

upload melalui aplikasi Dapodik. "Dasar pemberian bantuan, sesuai dengan nomer yang terdata. Diperkirakan bantuan akan terealisasi akhir September atau awal Oktober 2020," tandasnya.

Sekadar diketahui jika sampai saat ini dengan kondisi Kabupaten Blitar yang masih zona oranye penyebaran Covid-19, atau masuk kategori daerah dengan tingkat penularan sedang. Belum bisa melaksanakan sistem Pembelajaran Tatap Muka (PTM), sesuai aturan yang diperbolehkan adanya daerah dengan zona kuning dan zona hijau.

Ditambahkan Budi, bagi siswa yang tidak mempunyai smartphone atau handphone, bisa menggunakan milik orang tuanya. "Sehingga yang didaftarkan nomer HP orang tua, yang digunakan untuk belajar daring," pungkasnya. (ais)

TAHAPAN PILKADA LANGGAR PROTOKOL CORONA, SIAP-SIAP DITERTIBKAN POLISI

Serotan terhadap tahapan Pilkada 2020 yang banyak melanggar protokol kesehatan (prokes) pencegahan virus corona terus mencuat. Hingga kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun belum menerbitkan aturan pastinya. Meski demikian para peserta Pilkada Serentak tidak bisa lagi memandang sebelah mata aturan itu, sebab Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat Kapolri tentang kepatuhan protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan 2020. Salah satu poinnya adalah pihaknya akan melakukan tindakan kepolisian yang di-

perluken sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah ini memang perlu dilakukan mengingat Presiden Jokowi dikatakan tak setuju jika Pilkada 2020 harus ditunda. Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjoel Rachman mengatakan, Pilkada 2020 tetap digelar Desember mendatang. "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," kata Fadjoel dalam keterangan yang diterima, Senin (21/9).

Naskah/desain: Ais/istimewa/paulus



PENEKANAN MAKLUMAT KAPOLRI TERKAIT KEPATUHAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM TAHAPAN PILKADA 2020

1. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada adaptasi kebiasaan baru dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat:

A. Dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19

B. Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

C. Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.

D. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi atau sejenisnya.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DUA OPSI SANKSI DARI KPU

1. Pelanggar protokol kesehatan akan ditegur dan diminta menghentikan kegiatan kampanye tersebut.

2. Pengurangan hak kampanye dari segi waktu bagi pasangan calon kepala daerah. Contohnya pasangan calon kepala daerah itu akan dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan hak kampanye yang dilanggar selama 3 hari.



Kadiv Humas Polri Irjen
Argo Yuwono

"Pada hari ini 21 September 2020, Bapak Kapolri mengeluarkan maklumat terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi."



Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,
Hakam Sholahuddin

"Sampai sekarang memang belum ada aturannya. Maksudnya aturan bagi Bawaslu, untuk menindak pihak-pihak terkait dalam pilkada yang melanggar Protkes."



Komisioner KPU I Dewa Kade
Wiarsa Raka Sandi

"Ini masih konsep kami sebagai upaya tindak lanjut, jadi nanti ada beberapa opsi sanksi ya. Jadi pertama KPU tentu melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi, melakukan aspek edukasi masyarakat. Ini penting, jangan lalu kemudian kita hanya berpikir soal sanksi agar Pilkada ini tidak represif dan juga partisipatif."



MENGENAL VIROLOG ASAL CHINA

Li Meng Dan

Platform media sosial Twitter telah menanggapi atau men-suspend akun dari ahli virus China yang mengklaim bahwa virus corona baru atau Covid-19 dibuat di laboratorium di Wuhan.

Akun Li Meng Yan yang memiliki sekitar 60.000 pengikut telah dibekukan oleh raksasa medis sosial itu, setelah dia menuduh China membuat virus mematikan yang telah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia saat ini.

"Akun ditanggapi. Twitter menanggapi akun yang melanggar peraturan Twitter," tulis pesan Twitter.

Ahli virologi itu bersama tiga rekannya membuat klaim tentang asal usul virus corona baru dalam laporan yang diterbitkan pada minggu ini. Laporan itu menyebut teori asal usul alam kendati diterima secara luas, tidak memiliki bukti atau dukungan substansial.

Sementara, teori alternatif bahwa virus mungkin berasal dari laboratorium penelitian, bagaimanapun telah disensor secara ketat di jurnal ilmiah yang ditinjau oleh rekan sejawat.

Yan yang telah melarikan diri ke Amerika Serikat digambarkan sebagai whistleblower dalam sebuah wawancara pada awal pekan ini di Tucker Carlson Tonight Fox News.

Selama kemunculannya, dia mengklaim virus corona adalah hasil buatan manusia bukan dari alam.

"Saya memiliki bukti untuk menunjukkan mengapa mereka dapat melakukannya, apa yang telah mereka lakukan, dan bagaimana mereka melakukannya," katanya dalam program itu, seperti dikutip Express UK.

Dunia ilmiah juga diam ... bekerja sama dengan Partai Komunis China, mereka tidak ingin orang mengetahui kebenarannya. Itulah mengapa saya diskors, ditekan, dan saya adalah target yang diinginkan partai untuk menghilangkan," imbuhnya.

Laporan yang diposting di situs web Zenado itu belum ditinjau oleh rekan sejawat. Adapun, terkait penanggulangan akunya, Twitter juga belum mengeluarkan komentar.

Perbincangan tentang asal muasal virus corona baru ini terus berlangsung. Hingga kini belum ada bukti yang kuat dari mana virus dengan kekuatan penyebaran tinggi ini berasal. Sebagian besar ilmuwan percaya bahwa patogen berasal dari hewan yang melompat ke manusia melalui inang lain.

Li-Meng Yan atau Yan Limeng adalah seorang ahli virus dari China. Yan mengklaim bahwa dia adalah salah satu ilmuwan pertama di dunia yang mempelajari wabah virus korona di

Wuhan.

Salah seorang atasannya di HKU (laboratorium referensi WHO), memintanya untuk menyelidiki sekelompok kasus mirip SARS di Wuhan, pada Desember 2019.

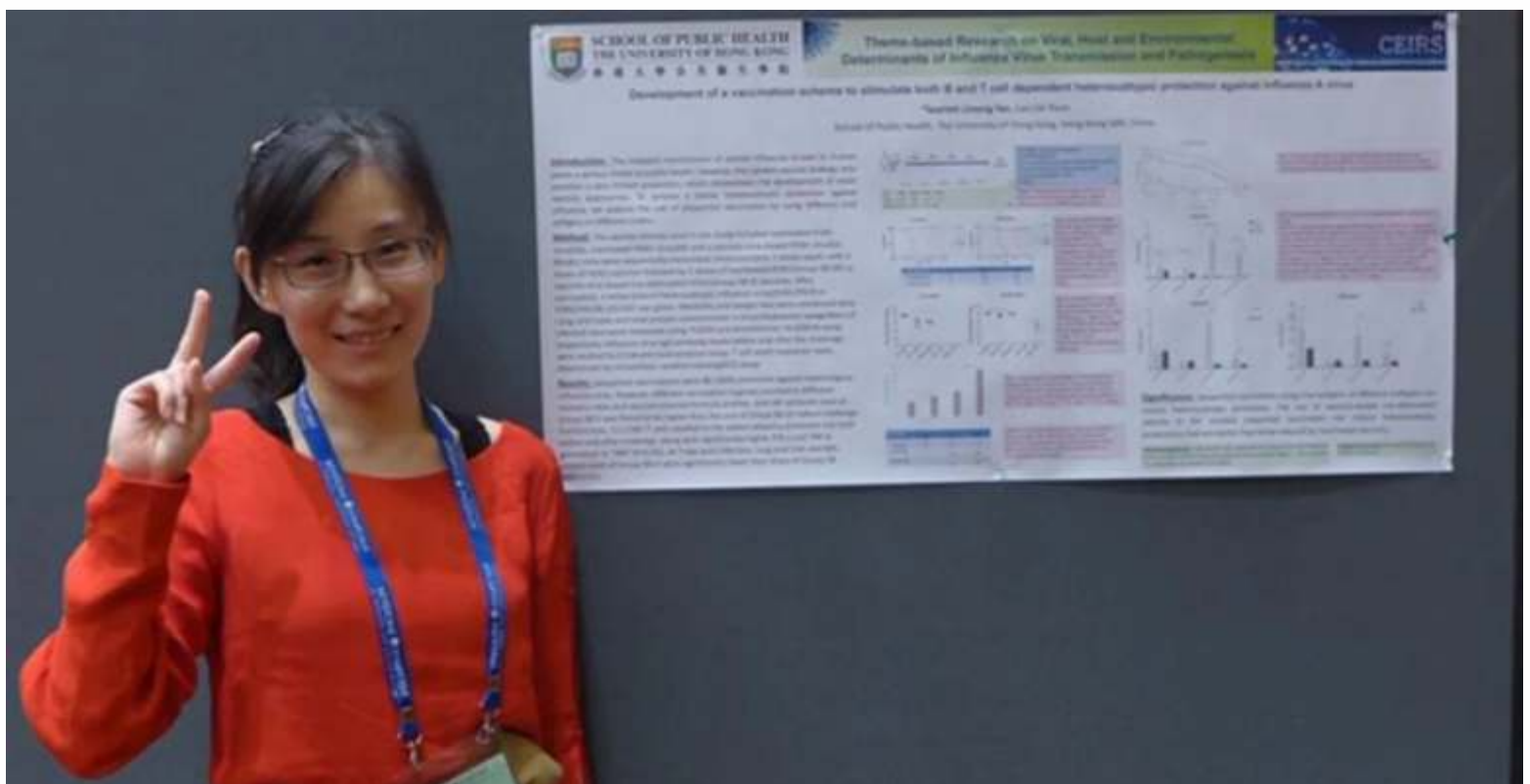
Menurut Fox News, Yan mempertahankan jaringan profesional medis yang luas dari Tiongkok daratan, salah satunya memberi tahu Yan tentang penularan penyakit baru dari manusia ke manusia pada 31 Desember 2019.

Dia ikut menulis makalah berjudul "Patogenesis dan penularan SARS-CoV-2 pada hamster emas", yang diterbitkan di Nature pada Mei 2020, mengenai penularan virus pada hamster. Makalah ini disusun bersama mantan rekannya di HKU.

Pada Juli 2020, siaran pers dari HKU membantah klaimnya dan menyatakan bahwa "HKU mencatat bahwa isi laporan berita tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta.

Pada September 2020, Yan diwawancarai dalam acara bincang-bincang Loose Women dan mengatakan dia berencana untuk merilis bukti ilmiah bahwa SARS-Cov-2 dibuat di laboratorium Wuhan. Menurut Yan, "virus ini bukan dari alam".

Direktur Intitute Virologi Wuhan pun membantah bahwa virus itu secara tidak sengaja menyebar dari fasilitas tersebut (Ist).





Kesemutan adalah gejala yang dirasakan ketika terjadi hambatan aliran darah atau gangguan pada saraf. Salah satu anggota tubuh yang paling sering mengalami kesemutan adalah kaki. Dengan memperbaiki posisi atau postur tubuh, melakukan peregangan atau latihan untuk melenturkan badan juga bisa mengurangi gejala kaki sering kesemutan. Mengutip literatur, jika kaki terlalu sering kesemutan, maka itu sinyal munculnya penyakit berikut ini:

KAKI KESEMUTAN JADI SINYAL GEJALA MUNCULNYA PENYAKIT



Diabetes

Diabetes bisa menyebabkan kerusakan saraf karena tingginya kadar gula dalam darah. Selain kaki sering kesemutan, diabetes juga harus diwaspadai apabila Anda memiliki kondisi berikut sering haus dan lapar berlebihan, jarang bergerak, keluarga yang memiliki riwayat diabetes tipe 2.



Efek samping obat-obatan

Kaki sering kesemutan, hal ini bisa diakibatkan dari efek samping obat-obatan ataupun pengobatan yang sedang dijalani. Jenis obat-obatan yang dapat menjadi penyebabnya adalah obat-obat kemoterapi dan obat-obatan untuk HIV/AIDS.



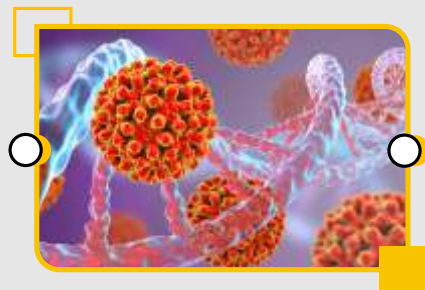
Kekurangan atau kelebihan vitamin B

Saraf dan selubung saraf memerlukan vitamin B untuk dapat berfungsi dengan baik. Saat tubuh kekurangan vitamin B1 dan B12, kaki sering kesemutan bisa muncul sebagai salah satu gejalanya. Tidak hanya itu, kelebihan vitamin B6 juga bisa menyebabkan gejala yang sama.



Saraf Terjepit

Penyebab kaki sering kesemutan juga bisa disebabkan saraf terjepit. Kondisi ini biasanya diikuti gejala lain, seperti rasa nyeri tak tertahankan dan sakit di pinggang atau punggung bawah. Dalam kondisi ringan atau sedang, rasa nyeri karena saraf terjepit.



Infeksi

Kaki kesemutan bisa menandakan adanya peradangan saraf. Salah satu penyebab saraf mengalami peradangan adalah infeksi virus dan bakteri. Beberapa contoh penyakit infeksi, di antaranya hepatitis B dan C, HIV dan AIDS, penyakit Lyme, hingga cacar api.



Penyakit Autoimun

Penyakit autoimun, seperti lupus, penyakit celiac, rheumatoid arthritis (radang sendi), dan sebagainya, bisa menjadi penyebab kaki sering kesemutan. Penyakit autoimun adalah gangguan di mana sistem kekebalan menyerang tubuhnya sendiri. (Ist)

7 TREN TEKNOLOGI YANG MEMPENGARUHI KEHIDUPAN MANUSIA PADA 2025

Huawei mengidentifikasi munculnya 10 megatrend baru yang mempengaruhi tatanan kehidupan manusia dan cara mereka bekerja di masa depan. Hal tersebut ditulis Huawei dalam laporan mengenai Global Industry Vision (GIV) yang mencakup berbagai prediksi seputar perkembangan dunia teknologi dan industri hingga tahun 2025. Ada tujuh tren menarik yang dirangkum atas prediksi Huawei di tahun 2025 termuat dalam laporan GIV, meliputi:



GELARAN 5G SEMAKIN CEPAT

5G sudah di depan mata dan jauh lebih cepat dari generasi nirkabel sebelumnya. Tahun 2025, 58 persen populasi penduduk di dunia akan dapat menikmati akses 5G



KOMUNIKASI BEBAS HAMBATAN

AI dan analitik big data akan berperan besar dalam membangun komunikasi yang bebas hambatan antara perusahaan dengan pelanggan. 86 persen data yang dihasilkan oleh perusahaan di dunia akan digunakan secara optimal oleh mereka.



SISTEM TRANSPORTASI CERDAS

Sistem transportasi cerdas diprediksikan akan mampu membangun keterhubungan antara manusia, kendaraan, dan infrastruktur. Nantinya 15 persen kendaraan akan dilengkapi dengan teknologi Cellular Vehicle-to-Everything.



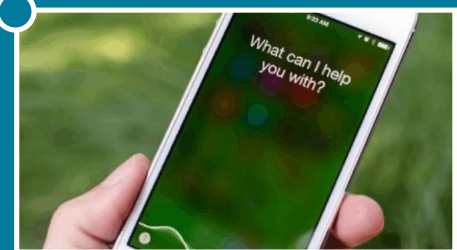
ROBOTIKA DI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Perkembangan AI perseptual, hingga jaringan menjadi pemacu makin gencarnya pengadopsian robotika dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk mendukung kebutuhan personal lainnya



SUPER SIGHT

Tingginya penerapan teknologi 5G, VR/AR, machine learning, dan sejumlah teknologi berkembang lainnya dalam kehidupan sehari-hari telah membuka cakrawala baru di dunia teknologi.



ZERO SEARCH

Model pencarian di masa depan tak lagi membutuhkan tombol untuk memberi perintah. 90 persen pemilik perangkat cerdas akan mengaktifkan teknologi personal assistants cerdas untuk keperluan sehari-hari. (Ist)

COBA PAKAI MASKER MINYAK ZAITUN

Untuk Perawatan Rambut

Jika kamu memiliki jenis rambut kering, minyak zaitun adalah pilihan yang tepat. Paparan sinar matahari yang berbahaya, bahan kimia, pori-pori rambut tersumbat, cuaca ekstrem, merokok dan konsumsi alkohol dapat membuat rambut menjadi kering. Minyak zaitun terbukti menjadi pelembab yang efektif untuk kulit kepala. Ini mengkondisikan kepala untuk meningkatkan kualitas rambut, membuatnya lembut dan halus. Salah satu cara untuk mengambil manfaat dari minyak zaitun untuk diaplikasikan ke rambut adalah dengan membuatnya menjadi masker rambut. Yuk simak caranya

MINYAK ZAITUN DAN TELUR

Siapkan 2 butir telur dan 2 sdm minyak zaitun. Cara membuatnya, campurkan adonan telur dengan minyak zaitun. Oleskan campuran tersebut ke rambut basah.

Biarkan selama sekitar 20 menit. Setelah 20 menit berakhir, keramas dan gunakan kondisioner rambut seperti biasa. Gunakan masker rambut ini seminggu sekali untuk hasil yang diinginkan.



MINYAK ZAITUN DAN PISANG

Yang Anda butuhkan adalah 1 buah pisang matang 1 sdm minyak zaitun. Campur kedua bahan dalam mangkuk. Keramas rambut Anda dengan sampo ringan. Oleskan campuran tersebut ke kulit kepala dan kerjakan ke sepanjang rambut. Biarkan selama sekitar 30 menit. Bilas bersih dan ikuti dengan kondisioner. Gunakan masker rambut ini seminggu sekali untuk hasil yang diinginkan.



MINYAK ZAITUN DAN MADU

Caranya, campurkan 3 sdm minyak zaitun dan 1 sdm madu ke dalam sebuah wadah. Cuci rambut

Dengan sampo dan biarkan mengering. Setelah rambut benar-benar kering, oleskan campuran tersebut ke kulit kepala dan rambut Anda. Biarkan selama sekitar satu jam. Keramas dan beri kondisioner rambut seperti biasa. Gunakan masker rambut ini seminggu sekali untuk hasil yang diinginkan



MINYAK ZAITUN DAN MINYAK KELAPA

Anda bisa membuat masker rambut dari 1/2 cangkir minyak kelapa dan 1 cangkir minyak zaitun. Campur kedua minyak dalam mangkuk. Oleskan ramuan tersebut pada kulit kepala dan rambut. Pijat kulit kepala Anda selama 3-5 menit. Biarkan selama 30-45 menit lagi. Setelah itu, keramas dan beri kondisioner. Gunakan masker rambut ini seminggu sekali untuk hasil yang diinginkan. (Naskah/Foto: Istimewa)



Makin Buram (dari hal 1)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan prihatin terkait tren putusan pengurangan hukuman koruptor yang terus terjadi di tingkat Mahkamah Agung (MA). KPK mencatat sedikitnya ada 15 perkara korupsi yang ditangani KPK mendapatkan pengurangan hukuman pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di MA.

"Kami mencatat hingga saat ini sekitar 20 perkara yang ditangani KPK sepanjang 2019-2020 yang hukumannya dipotong," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (21/9).

KPK menyatakan deretan putusan yang mengurangi hukuman kasus korupsi itu tidak sejalan dengan upaya bersama semua pihak dalam melawan korupsi. Meski begitu, KPK tetap menghormati putusan MA tersebut. KPK juga berharap MA agar dapat segera mengirimkan salinan putusan perkara agar dapat ditindaklanjuti.

"Di sisi lain putusan demikian juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam perang melawan korupsi. Beberapa perkara PK yang telah diputus majelis hakim, KPK belum mendapatkan salinannya sehingga tidak tahu pertimbangan apa yang menjadi dasar pengurangan hukuman tersebut," ucap Ali Fikri.

Teranyar MA memotong hukuman mantan anggota DPR Musa Zainuddin dari 9 tahun penjara menjadi 6 tahun bui. Padahal, menurut KPK, Musa terbukti menerima suap terkait pembangunan jalan Taniwel-Saleman senilai Rp 56 miliar dan rekonstruksi Piru-Waisala Provinsi Maluku Rp 52 miliar dalam APBN Kementerian PUPR 2016.

Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai ada pergeseran komitmen antikorupsi para hakim agung di MA. "Hakim agung sudah bergeser komitmen antikorupsinya. Hal ini bisa terjadi salah satu sebabnya tidak ada lagi figur yang disegani untuk tetap menghukum koruptor dengan hukuman tinggi agar ada efek jeranya sejak hakim Artidjo Alkostar pensiun," kata Abdul Fickar, di Jakarta.

Abdul Fickar mengatakan belum lama ini MA telah mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia menilai Perma tersebut belum efektif dijalankan. Menurutnya, Perma itu dalam prakteknya belum bisa mengatasi disparitas hukuman dan menjamin efek jera bagi koruptor. "Mestinya ada aturan yang bersifat sistemik yang bisa mengikat komitmen para hakim. Namun ternyata meski sudah ada Perma yang mengatur pedoman pemidanaan koruptor, ternyata tidak menjadi obat ampuh mempertahankan komitmen itu," imbuhnya.

Abdul Fickar menilai belum efektifnya Perma lantaran ada anggapan pedoman itu mengintervensi kebebasan hakim agung

dalam memutuskan perkara. Menurutnya, MA juga kesulitan untuk membuat pedoman itu mengikat kepada para hakim agung. "Ironis memang. Meskipun para hakim agung tidak protes keberatan secara terbuka, ternyata yang terjadi Perma itu diabaikan karena dianggap mengintervensi kebebasan para hakim agung," tukasnya.

Hal senada diungkapkan Indonesia Corruption Watch (ICW) saat mendengar bebasnya mantan Menteri Sosial Idrus Marham dari jeratan hukum. Idrus bebas setelah menjalani masa hukuman 2 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi. Padahal pada tingkat banding, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Ketua Mahkamah Agung mengevaluasi dan menaruh perhatian terhadap majelis hakim yang menyidangkan perkara korupsi. "Baik di tingkat kasasi atau pun peninjauan kembali (PK)," ujar Kurnia.

ICW juga berpandangan, setidaknya ada

tiga hal yang semestinya tercantum dalam putusan hakim saat menyidangkan perkara korupsi. Pertama, menjatuhkan pidana penjara yang maksimal. Kedua, memaksimalkan pemberian hukuman berupa uang pengganti. Ketiga, mencabut hak politik--jika terdakwa berasal dari lingkup politik.

Soalnya menurut catatan ICW, sejak 2005 putusan hakim dapat dikatakan jarang berpihak pada isu pemberantasan korupsi. "Sebagai contoh, tren vonis ICW pada tahun 2019 yang lalu menunjukkan bahwa rata-rata vonis untuk para koruptor hanya 2 tahun 7 bulan. Belum lagi perbandingan antara kerugian negara dan uang pengganti," jelas Kurnia.

Berdasarkan pantauan ICW, total kerugian negara sepanjang tahun 2019 mencapai Rp12 triliun, akan tetapi vonis uang pengganti hanya berada di angka Rp748 miliar. "Untuk itu, dengan melihat data di atas, cita-cita untuk dapat menghentikan laju korupsi sebenarnya masih sebatas angan-angan belaka," kata Kurnia. (ist, ins)

20 PERKARA (dari hal 1)

7. MA mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan **OC Kaligis**. MA memutuskan mengurangi masa penahanan OC Kaligis sebanyak 3 tahun. Vonis OC Kaligis sebelumnya 10 tahun penjara, kini menjadi 7 tahun penjara. OC Kaligis terbukti menyuap majelis hakim dan panitera PTUN di Medan sebesar 27.000 dollar AS dan 5.000 dollar Singapura.
8. MA mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) **Irman Gusman** dan meringankan hukuman mantan Ketua DPD itu. Irman terbukti korupsi mengurus impor gula. PN Jakpus menghukum Irman 4,5 tahun penjara MA mengurangi menjadi 3 tahun penjara.
9. **Panitera PN Medan**, Helpandi juga merasakan sunat vonis. Majelis sepakat mengurangi hukuman Helpandi dari 7 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara. Helpandi juga diberi hukuman denda Rp 300 juta subsidair 6 bulan kurungan.
10. Di Pengadilan Tipikor Jakarta, **M Sanusi** dinyatakan terbukti menerima suap Rp 2 miliar dari bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Sanusi divonis 7 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama ini. Hukuman Sanusi diperberat menjadi 10 tahun penjara. Putusan ini diperkuat putusan kasasi. Di tingkat peninjauan kembali (PK), Sanusi dikurangi hukumannya menjadi 7 tahun penjara.
11. **Panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**, Tarmizi di kasus korupsi terkait penanganan perkara perdata di PN Jaksel. Diputus 4 tahun, hukuman Tarmizi menjadi 3 tahun.
12. **Mantan Hakim MK, Patrialis Akbar**, di kasus suap terkait impor daging. Patrialis diputus 8 tahun, setelah dipotong hukumannya menjadi 7 tahun penjara.
13. **Eks Direktur Utama PT Erni Putra Terari, Tamin Sukardi**, di kasus suap penanganan perkara di PN Medan. Diputus 6 tahun, menjadi 5 tahun.
14. **Eks Bupati Talaud, Sri Wahyu Manalip** di kasus suap revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo. Semula putusannya adalah 4 tahun 6 bulan, menjadi 2 tahun penjara.
15. **Mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina, Suroso Atmomartoyo**. Pidana uang pengganti dihapus, pidana penjara tetap.
16. **Mantan Panitera Pengganti PN Bengkulu, Badaruddin Bachsin alias Billy** di tahap kasasi divonis 8 tahun. Pada tahap PK, vonis Billy menjadi 5 tahun.
17. **Eks Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra** divonis 5,5 tahun. Usai mengajukan permohonan PK, vonisnya berkurang menjadi 4 tahun.
18. **Eks Cagub Sulawesi Tenggara, Asrun**, pidana penjaranya dikurangi menjadi 4 tahun di tahap PK. Sebelumnya, vonis Asrun itu 5,5 tahun.
19. **Mantan Panitera Pengganti PN Jakarta Utara, Rohadi** pada tahap pertama dihukum 7 tahun. Pada tahap PK, hukuman dikurangi menjadi 5 tahun.
20. **Mantan anggota Komisi V DPR, Musa Zainuddin** di kasus suap infrastruktur diputus 9 tahun penjara. Di tahap PK, hukuman terhadap Musa dikurangi 3 tahun. Sehingga vonis akhir menjadi 6 tahun penjara.

Drs. H. ACHMAD ISKANDAR, M.Si
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURHj. ANIK MASLAGHAH, S.Pd., M.Si
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURKUSNADI, SH., M.Hum
KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURH. ANWAR SADAD, M.Ag
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURSAHAT TUA P. SIMANJUNTAK, SH
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

DPRD JATIM BERHARAP MITIGASI BENCANA KEKERINGAN DITINGKATKAN

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim,
Hikmah Bafaqih

Surabaya – Seiring dengan musim kemarau tahun ini, kekeringan sudah terjadi di beberapa daerah. Bahkan berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Malang, ada empat Kabupaten di Jatim yang mengalami kekeringan ekstrem itu yakni Bangkalan, Bondowoso, Pamekasan, dan Sampang. Selain itu beberapa daerah lainnya juga berpotensi terjadi kekeringan termasuk Lamongan.

Kodrat Sunyoto, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, mengatakan Waduk Gondang mengalami kekeringan. Hal itu membuat ladang pertanian warga tidak bisa teraliri air dan terancam gagal panen. "Masyarakat desa Badungsari ini memang benar-benar kesulitan air untuk pertanian," katanya.

Melihat kondisi ini, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, mengatakan bahwa secara alamiah kekeringan itu bisa terjadi karena pemanasan global. "Menurut kajian kawan-kawan yang konsen di lingkungan, ya terlampaui cepat (terjadi kekeringan). Ada proses dimana titik air terlalu dalam. Kemudian, untuk mendapatkan air bersih menjadi sangat mahal, tidak cukup dengan pompa rumahan, tetapi dibutuhkan pompa dengan kapasitas besar yang tentu tidak semua tempat mampu mengupayakan," katanya, Senin (21/9/2020).

Terkait dengan kondisi ini, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan bahwa mitigasi dari pemerintah dan juga yang lainnya masih kurang terkait perubahan iklim. Mitigasi itu kaitannya dengan bagaimana membaca bahwa perubahan iklim adalah sebuah keniscayaan dan mestinya ditangani lebih cepat.

Dia mengatakan, saat ini ada kesan bila upaya yang dilakukan lebih pada tanggap fase darurat ketika terjadi bencana kekeringan. Diantaranya dengan mengirimkan suplai air bersih dan makanan. Namun demikian, lanjut Hikmah, hal itu tidak salah dan jelas harus dilakukan.

"Hanya kalau setiap tahun kita meresponnya di fase tanggap darurat, sampai kapan kita akan berkejaran dengan kemungkinan banyaknya lagi kerusakan lingkungan, semakin lama nanti akan semakin berat beban kerja di fase tanggap darurat, apabila soal-soal yang lebih ke hulu tidak tertangani," tandasnya.

Inisiatif-inisiatif untuk menyelamatkan lingkungan itu bagian dari upaya mitigasi yang menurut Hikmah kurang begitu populer. Banyaknya kegiatan tanam sejuta pohon hanya sebagai ceremony dan belum menjadi tradisi rumah tangga. Diantaranya tradisi itu seperti satu kelahiran anak, satu pohon ditanam; sekian kali pohon ditebang untuk bikin rumah, sekian kali pula pohon harus ditanam untuk mengembalikan ekosistem. "Kesadaran seperti itu kan sudah tidak ada lagi hari ini," tandasnya.

Untuk itu, Hikmah meminta pemerintah harus semakin giat melakukan mitigasi ke masyarakat. Mitigasi berupa edukasi membangun awareness tentang pentingnya tindakan mitigasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, memfasilitasi proses menanam kembali untuk menyelamatkan mata air; menanam mata air dengan pohon-pohon besar yang mempunyai akar-akar bagus dan sebagainya.

Kemudian, harus ada ketepatan di mana pohon harus ditanam. Jenis tanaman yang ditanam juga harus betul-betul bisa meningkatkan air. Semua itu tidak bisa hanya dengan gerakan ceremony pemerintah dan menggerakkan masyarakat sesaat. Namun, harus menjadi tradisi seperti yang dilakukan nenek moyang dulu, dimana satu kelahiran maka satu pohon ditanam, satu keluarga baru maka ada satu pohon ditanam. "Alangkah baiknya itu kembali dihidupkan," paparnya.

Untuk melakukan edukasi mitigasi ini, maka harus dilakukan oleh lintas sektor; tidak hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja, namun juga Dinas Pendidikan dan yang lainnya. Hikmah menandakan, Dinas Pendidikan seharusnya bisa mengupaya lebih banyak sekolah Adiwiyata. Bahkan seharusnya semua sekolah menjadi sekolah Adiwiyata yang kemudian menularkan sikap cinta lingkungan untuk menjadi perilaku keseharian di rumah.

"Ini kalau sekadar sekolahnya yang Adiwiyata, muridnya tidak terbangun perilaku cinta lingkungan, itu ya berarti belum Adiwiyata sesungguhnya. Dan kalau satu kabupaten hanya ada 5 sampai 7

sekolah Adiwiyata, maka di lingkungannya itu belum Adiwiyata," tandasnya.

Untuk menumbuhkan sekolah Adiwiyata, tentunya membutuhkan inisiatif dari kepala sekolah dan guru yang memang pro-lingkungan. "Setidaknya, murid juga diajak untuk sadar tentang manfaat pohon, kemudian mencari mata air yang kering, mencari sumber mata air yang mati untuk ditanami dan dipelihara tumbuhannya, seperti itu yang harus ditumbuhkan," pungkask Hikmah.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jatim, Kuswanto mengharapkan BPBD Jatim terus berupaya menengendalikan kekeringan. "Saya rasa sudah dilakukan pemetaan untuk itu, tapi lagi-lagi ya memang kita tidak bisa berharap seluruh wilayah bisa ter-cover karena keterbatasan," katanya.

Dia juga menjelaskan, selama ini dari sisi infrastruktur pemerintah sudah berupaya menyiapkan sumur pompa. Tapi memang tidak bisa dianggarkan secara serentak untuk seluruh wilayah yang mengalami kekeringan. Pengadaan sumur pompa ini dilakukan setiap tahun secara bertahap supaya mampu memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat.

"Karena tidak bisa memenuhi semua kebutuhan dan anggarannya juga lumayan besar maka solusinya adalah bantuan air bersih dari Pemprov Jatim yang dikelola langsung oleh BPBD. Tetapi pemprov tetap mengalokasikan untuk pembuatan sumur di wilayah-wilayah yang tingkat kekeringan permanen," katanya.

Untuk pengadaan sumur pompa ini sudah dilakukan hampir di semua daerah, seperti Banyuwangi, Kediri, Blitar dan lainnya, namun jumlahnya tidak bisa memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya. Kuswanto menegaskan pengadaan itu akan dilakukan bertahap melalui pemetaan yang sudah dibuat Pemprov Jatim. (ufi/adv)

